

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aperldoorn, L.J. Van, 2009, *Pengantar Hukum*, Prandya Paramita, Jakarta.
- Bakri, Muhammad, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta, Citra Media, hlm. 5.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar.
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H. S, Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Santoso, Agus, 2013, *Menyingkapi Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Material Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Slamet Edi Irianto, 2009, *Pajak Negara Demokrasi dan Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanintijo. 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Syamsah, H.T.N, 2010, *Kedudukan Pengadilan Pajak dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Unida Press, Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 326/B/PK/Pjk/2018 terhadap Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017 .

D. Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal

Arsadt, 2017, “Eksistensi asas *Pacta Sunt Servanda* atas Perubahan Undang-Undang (Kajian mengenai Kontrak Karya Pertambangan PT Freeport)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

L K, Rudi Krisyantho, 2017, “Keberadaan Asas Itikad Baik dalam Rezim Hukum Perjanjian (Kontrak Karya) atas Berlakunya Rezim Hukum Izin (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Suatu Kajian dalam Kasus PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Ngaini, Fitria Nur, 2015, “Renegosiasi Kontrak Karya dalam Bidang Pertambangan Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Politik Hukum”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Achmad, Suranto, Pujiyono, *Harmonisasi Pengaturan Pajak Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah (Studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar)*, Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari – April 2015.

E. Internet

Anonim, *Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou>, diakses pada tanggal 5 November 2018, pukul 08.50 WIB.

_____, *Sejarah Berdirinya Freeport Indonesia Sejak Tahun 1967*, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-berdirinya-freeport>, diakses pada tanggal 14-05-2019, pada pukul 11.16 WIB.

_____, *Dari Hulu Hingga Ke Hilir*”, https://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf, diakses pada tanggal 22 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

Hermansyah, Agung, *Khilaf Putusan MA terhadap Freeport*, <http://harian.anaalisada.ily.com/opini/news/khilaf-putusan-ma-terhadap-freeport/570219/2018/06/12>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 13.31 WIB.

Juwana Hikmahanto, *Ancaman Arbitrase Freeport*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/21503631/ancaman.arbitrase.freeport>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 15.49 WIB.

PT Freeport Indonesia, *Warisan Kami*, <https://ptfi.co.id/id/our-heritage>, diakses pada tanggal 01 Juni 2019, pukul 12.33 WIB.

Shidarta & Petrus Lakonawa, 2018, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, <http://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, diakses pada tanggal 19 September 2018 Pukul 11.50 WIB.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, http://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BukuMTKPPT2.pdf, hlm. 14-15, diakses pada tanggal 13 Mei 2019, pada pukul 01.19 WIB.